**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Penulis akan mereview skripsi dari Nuthalia Rahmah dengan judul *Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang Dalam Perjanjian Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Di Bidang Pertanian.[[1]](#footnote-1)* Skripsi ini berisi mengenai Bahwa kedua negara yakni Indonesia dan Jepang telah mejalin hubungan kerjasama dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*  atau IJEPA sejak tahun 2008. Dalam kerangka IJEPA kedua negara sepakat untuk menghapus hambatan tariff masuk untuk sebagian besar ekspor komodiri pertanian. Khusus untuk ekspor karet, Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk menghapus bea tariff masuk karet pada tahun 2011. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka perjanjian IJEPA pada ekspor komoditi karet Indonesia ke Jepang berjalan dengan efektif. Bahkan kedua negara dapat mengalami interdependen khusunya untuk perdagangan pertanian komoditi karet. Bagi Indonesia, kerjasama dalam kerangka IJEPA memberikan keuntungan yakni meningkatnya ekspor karet Indonesia ke Jepang khususnya di tahun 2011-2015. Dan Indonesia menjadi negara produsen utama ekspor karet ke Jepang serta produksi komoditi karet Indonesia telah meningkat menjadi produk yang siap bersaing di pasar Jepang. Itu berarti Indonesia telah mendapatkan pangsa pasar khususnya untuk hasil produksi karet di Jepang.

Bagi Jepang, kerjasama dalam kerangka IJEPA memberikan keuntungan di mana Jepang dapat memperkuat bahkan meningkatkan akses pasarnya di Indonesia dengan menjadi negara tujuan utama ekspor karet Indonesia yang berada diurutan kedua mengalahkan Tiongkok. Hal ini sesuai dengan tujuan Jepang dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui kerangka IJEPA. Selain itu, dari penerapan IJEPA, Jepang juga medapatkan harga bahan baku karet yang lebih murah dari Indonesia.Jepang juga dapat menjual bahan jadi karetnya ke Indonesia Di mana Jepang mendapatkan pangsa pasar untuk industri karetnya di Indonesia. Efektifnya hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui kerangka IJEPA di ekspor karet Indonesia ke Jepang ini akan mempererat hubungan Indonesia dengan Jepang untuk lebih memanfaatkan IJEPA dalam melakukan kerjasama perdagangan di bidang lain selain pertanian.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengekspor karet ke Jepang adalah menurunnya harga karet dunia yang menyebabkan rendahnya nilai ekspor karet Indonesia ke Jepang. Hal ini menyebabkan rendahnya keuntungan yang didapatkan Indonesia dalam mengekspor karet ke Jepang.Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah persaingan dengan negara lain dalam mengekspor karet Indonesia. Walaupun Indonesia dan Jepang telah menyepakati penghapusan hambatan tariff masuk untuk komoditi karet, namun hal tersebut tidak mengurangi persaingan Indonesia dengan negara Thailand dan Vietnam dalam mengekspor karet ke Jepang.

Literasi kedua, penulis mereview skripsi karya A. Fauziah yang berjudul, *Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Jepang Dalam Bidang Ekspor Non Migas Indonesia ke Jepang Pada Komoditas Pertanian (2011-2015).[[2]](#footnote-2)* Skripsi ini berisi Kerjasama internasional dalam bidang ekonomi terjalin tidak hanya terbatas di antara negara-negara yang telah maju saja. Tetapi juga dapat dilakukan antara negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, yang memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan internal, sehingga negara-negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Pada hakekatnya prinsip kerjasama, baik bilateral maupun multilateral, adalah saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa melihat besar kecilnya atau mampu tidaknya suatu negara. Dengan demikian hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang tertentu dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan. Tujuan akhir dari hubungan bilateral yang didasari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing Negara.

Indonesia dan Jepang sudah sejak tahun 1957 menjalin hubungan kerjasama, terutama dalam bidang perdagangan[[3]](#footnote-3). Hal ini dapat kita lihat sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar gas alam ke Jepang di mana angka pasokannya mencapai 50% - 70% ekspor LNG Indonesia ke Jepang. [[4]](#footnote-4)Meskipun mempunyai hubungan sejarah yang buruk di masa lalu ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonialisme Jepang, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama di berbagai bidang lebih dari 55 tahun. Jepang merupakan negara mitra dagang utama Indonesia, baik dalam hal ekspor maupun impor. Jepang menempati peringkat pertama dengan pangsa pasar 12,72% sebagai negara tujuan utama ekspor non migas Indonesia pada tahun 2010.[[5]](#footnote-5)Hal ini menunjukan bahwa Jepang merupakan mitra strategis yang sangat penting bagi Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komperehensif antara Indonesia dengan Jepang, pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang pengesahan *Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008. Sebaliknya Jepang sudah jauh lebih berpengalaman melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Meksiko serta masih dalam perundingan dengan Korea Selatan, Thailand, dan Filipina.[[6]](#footnote-6)

IJEPA merupakan suatu bentuk dari perjanjian yang mewadahi segala bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Awalnya, IJEPA muncul berdasarkan *Economic Partnership Agreement* atau disingkat dengan EPA yang dibentuk oleh Jepang. EPA adalah sebuah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan penambahan imigrasi sebagai tambahan dari kesepakatan. Maka dapat diaphami bahwa EPA merupakan strategi kerjasama yang digunakan oleh Jepang dalam merangkul suatu negara atau kawasan yang menurutnya memiliki potensi bagi perkembangan perekonomiannya.[[7]](#footnote-7) Sebelum adanya IJEPA, kersasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang pernah menguat dengan terbentuknya *Joint Study Group* pada Juni 2003 yang membahas mengenai bentuk yang tepat dan masa depan kerjasama bilateral diantara kedua negara di kemudian hari. Salah satu faktor yang dituju pemerintah Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang ini adalah peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang, terutama dalam ekspor non-migas. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sumber penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan mengekspor hasil-hasil yang diproduksi dari dalam negeri ke luar negeri. Hasil devisa yang didapat dari proses perdagangan ini dapat digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor seringkali mengalami hambatan, baik itu hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Hambatan tarif berupa adanya penetapan tarif oleh negara penerima terhadap komoditi ekspor yang masuk ke negaranya; sedangkan hambatan non-tarif berupa masalah pelabelan, standarisasi, isu dumping, dl.

Sektor industri menempati peringkat pertama dalam sumbangan pada ekspor non-migas Indonesia, diikuti sektor pertambangan, dan terakhir yang terkecil adalah sektor pertanian. Kecilnya sumbangan sektor pertanian dalam ekspor non-migas Indonesia ini agak mengherankan mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai negara agraris. Selama beberapa tahun terakhir ekspor non-migas secara keseluruhan menunjukan kinerja yang cukup baik. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja di sektor tersebut. Luasnya lahan pertanian yang dimiliki Indonesia, kualitas lahan yang dimiliki, kultur budaya pertanian yang melekat kuat dalam masyarakat Indonesia dan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi faktor yang seharusnya mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian disebutkan bahwa sektor pertanian memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian meliputi penyediaan pangan, bahan baku industri, lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup[[8]](#footnote-8)

Literasi ketiga, penulis mereview skripsi karya Ade Pebrina. Yang berjudul, *Peran ASEAN China Center dalam Hubungan Indonesia Tiongkok di Bidang Pendidikan pada tahun 2012 hingga 2016*.[[9]](#footnote-9) Skripsi ini berisi Indonesia merupakan negara yang memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan bahkan seruan untuk menjunjung tinggi pendidikan terdapat dalam pembukaan UdangUdang Dasar (UUD) 1945. Namun realisasinya pendidikan di Indonesia pada tahun 2012 belum dapat mencapai kemajuan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang dihadapi Indonesia pada sektor pendidikan seperti korupsi yang masih marak terjadi, alokasi anggaran yang belum didistribusikan secara maksimal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia berpengaruh terhadap upaya Indonesia untuk memajukan sektor pendidikannya. Untuk menanggulangi permasalahan ini pemerintah Indonesia sebaiknya menjalin kerjasama dengan negara yang sudah memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah pada sektor pendidikan di Indonesia. Sehingga dalam skripsi ini penulis menganalisa kerjasama pada bidang pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok melalui ASEAN China Center. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok sejatinya telah terjalin sejak lama dan pada perkembangannya kerjasama telah terjalin ke berbagai sektor mulai dari 49 perdagangan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Bidang pendidikan menjadi sektor yang difokuskan oleh kedua negara dalam skripsi ini. Kerjasama dengan Tiongkok yang telah membawa dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui ASEAN China Center Indonesia dapat mempererat hubungan dengan Tiongkok sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri. Sedangkan bagi Tiongkok kerjasama dengan Indonesia dijadikan sebagai sarana untuk memperluas pengaruhnya dalam bidang budaya sehingga Tiongkok dapat membentuk citra bahwa ia merupakan negara negara yang peduli dengan pendidikan walaupun mengusung ideologi komunis. ASEAN China Center yang menjadi arena bagi kerjasama antara Indonesia Tiongkok penulis anggap berhasil dalam meningkatkan kerjasama dalam sektor pendidikan antara kedua negera. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan beasiswa dari Tiongkok untuk pelajar Indonesia sekitar 10.000 pelajar, lalu Tiongkok juga mengundang 10.000 tenaga pengajar, ilmuan, untuk melakukan pertukaran di Tiongkok dalam bidang pendidikan olahraga dan kesenian. Kemudian Tiongkok juga mengadakan workshop untuk para pebisnis muda sehingga dapat meingkatkan mutu produk dan produk tersebut dapat bersaing dalam kancah Internasional. Selain menjadi arena ASEAN China Center juga menjadi Instrumen bagi pencapaian tujuan dari masing-masing negara dalam kerjasama ini untuk mencapai tujuan itu Tiongkok memberikan bantuan pada sektor pendidikan beberapa bentuk bantuan tersebut adalah beasiswa, workshop, pendirian pusat bahasa mandarin dan pelatihan keterampilan bagi pekerja Indonesia. Apa yang telah di upayakan oleh *ASEAN China Center* dalam kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dapat penulis 50 kategorikan sebagai sebuah peran yang dilakukan oleh *ASEAN China Center* dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Dari ketiga literatur diatas, dapat terlihat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dimulai dari judul dan tema yang diambil. Walaupun terdapat persamaan didalam variabel bebas ataupun terikat, namun penelitian yang penulis lakukan secara jelas akan menjelaskan mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang unuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

1. **Kerangka Teoritis**

Untuk memermudahkan proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa dan sebelumnya mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema penelitian ilmiah ini. Penulis mengunakan teroi-teori yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Untuk mengganalisis kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, yaitu: teori Hubungan Internasional, Bilateral, kerjasama Internasional (MOU).

* 1. **Teori Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti di bawah ini: “**Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara- negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan etika internasional” [[10]](#footnote-10)**

Hubungan Internasional adalah sebuah hubungan yang rumit Mochtar Mas’oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:

Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa- bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana.[[11]](#footnote-11)

Sebagai sebuah disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori realisme. Sebagaimana HI memiliki pondasi besar yang membuatnya tetap berdiri tegak sebagai studi yang dinamis, teori realisme juga sering disebut sebagai “spektrum ide”.[[12]](#footnote-12)

**“Politik luar negeri adalah suatu bentuk perilaku adaptif yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian politik luar negeri merupakan tindakantindakan autoritatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi aspek-aspek lingkungan internasional yang diinginkannya atau merubah aspek-aspek yang diinginkannya”**

“Suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”.[[13]](#footnote-13)

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eskternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersiapkan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sasaran dan kapabilitas yang dimilikinya.[[14]](#footnote-14)

* 1. **Teori Hubungan Bilateral**

Hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia termasuk kedalam hubungan bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang melalui kerjasama bidang pendidikan, menandakan adanya hubungan bilateral yang baik antara kedua negara tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku yang berjudul Diplomasi Antara Teori dan Praktik Karya Sukawarsini Djelantik, mendefinisikan bahwa:

“**Hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan hidup. Hubungan bilateral mengacu kepada hubungan politik, ekonomi maupun budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini kebanyakan diplomasi internasiomal dilakukan secara bilateral”[[15]](#footnote-15)**

Sesuai yang dinyatakan oleh D. Krisna bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling memengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak. Dalam pernyataan ini, dijelaskan bahwa hubungan bilateral terjalin dikarenakan adanya motif-motif kepentingan. Kata timbal balik menekankan pada adanya aksi reaksi dalam hubungan bilateral. Dalam konteks negara, hubungan timbal balik diartikan sebagai *win-win solution* dimana kepentingan masing-masing negara terpenuhi.[[16]](#footnote-16)

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselengaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

**“Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdeketan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.”[[17]](#footnote-17)**

Dilihat dalam jumlah negara yang melakukan interaksi maka hubungan bilateral merupakan hubungan yang paling sederhana karena hanya menyangkut dua negara. Hubungan bilateral ini terjadi karena beberapa hal diantaranya letak geografis, sumber-sumber kekayaan alam, kependudukan dan tenaga kerja, politik, ekonomi dan juga militer. Namun dari seluruh kepentingan diatas segalanya tetap bermuara pada kepentingan nasional diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka kepentingan nasional.

Istilah hubungan bilateral biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara kedua negara baik secara geografis berdekatan ataupun yang berjauhan.

**“Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberabg lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memerhatikan keamanan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi”[[18]](#footnote-18)**

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa negara manapun di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Dimana setiap negara berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya dengan mengadakan kerjasama atau hubungan baik bilateral maupun multilateral.

* 1. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama antara Jepang dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Meskipun Jepang dan Indonesia memiliki sejarah penjajahan oleh Jepang akan tetapi hubungan baik antara Jepang dan Indonesia masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Kerjasama Indonesia dan Jepang dimulai pada bulan April 1958 dengan Perjanjian Perdamaian yang dilakukan. Dengan aktivitas tersebut menjadi bukti akan banyaknya kegiatan kerjasama Internasional Indonesia dengan negara lainnya di dunia.

Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama *(Cooperation*), persaingan (*Competition)* dan pertentangan (*Conflict).* Pastilah dari semua negara sangat menginginkan situasi aman dan damai melakukan kerjasama merupakan interaksi yang dikatakan interaksi positif, untuk melaksanakan kerjasama ada tiga unsur utama yang berkaitan dengan kerjasama yakni unsur dua aktor ataupun lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Menurut Rose secara teoritis, istilah kerjasama (*Cooperation)* telah lama dikenal dan dikonsepkan sebagai suatu sumber efesiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi sekala (*Economies of Scales).[[19]](#footnote-19)*

Pada dasarnya semua keinginan negara merupakan memenuhi segala kebutuhannya namun keterbatasan selalu menghalangi pencapaiannya, untuk memenuhi kebutuhannya negara akan melakukan interaksi dan komunikasi terhadap negara yang dianggap akan memberikan bantuan kerjasama, kerjasama pada hakekatnya lazim dilaksanakan, Moh. Jafar Hafsah menyebut definisi kerjasama.[[20]](#footnote-20)

**“kerjasama adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”**

Hubungan yang jelas terlihat antara konflik dan kerjasama internasional, dimana konflik yang ada dapat diakomodasikan melalui negosiasi. Konflik potensial tersebut selalu berakhir melalui tingkatan kerjasama. Jadi hubungan kerjasama selalu menjadi pilihan yang tidak pernah ditinggalkan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Hukum internasional, organisasi internasional, hubungan ekonomi dan diplomasi adalah empat metode negara untuk selalu berusaha mengkordinasikan hubungannya secara konstruktif.

**“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang asama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa” (Soekanto, 1990: 72).**

Selain itu, Soerdjono Soekanto mengenai kerjasama:

**“Suatu kerjasama akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang” [[21]](#footnote-21)**

Keamanan menjadi *low politics* yang lebih menyoroti isu-isu non-keamanan. Kerjasama internasional sendiri merupakan proses utama dan interaksi internasional. Kerjasama internasional pada hakekatnya dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kerjasama Multilateral Hakekat dan kerjasama internasional yang *universal* (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik internasional.
2. Kerjasama Regional 22 Merupakan kerjasama anta negara yang berdekatan secara goegrafis kerjasama jenis ini merupakan gagasan yang mulai dikenal pada awal abad ke 19.
3. Kerjasama Fungsional Dalam kerjasama fungsional, negara-negara terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu, sehingga kerjasama tersebut akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara.
4. Kerjasama *ideology* Kerjasama ini merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya.

Ada tiga motif dalam melakukan suatu kerjasama internasional, yaitu:

• Meningkatkan kepentingan nasional

• Memelihara perdamaian

• Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Konsep kerjasama yang dipakai disini adalah kerjasama yang sifatnya internasional. Ada dua jenis interaksi dalam dunia internasional, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

* 1. **Konsep Pendidikan Indonesia**

Pendidikan merupakan instrument yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Kesusksesan sebuah negara membangun sistem pendidikan bisa menjadi salah satu tolak ukur dari kesuksesan generasi yang berhasil pada masa yang akan datang.Ki hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai berikut:

**“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.”**

**Sebagai tambahan Menurut UU No.20 tahun 2003** tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

**“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”**[[22]](#footnote-22)

Dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran,

perguruan tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih komprehensif sekaligus kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembaharuan metode pembelajaran yang lebih feksibel, dengan penempatkan mahasiswa sebagai subyek *(student-centered learning),* dibandingkan sebagai obyek pendidikan. Konsep pendidikan juga perlu didesain untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan peningkatan *soft skills serta success skills*, sehingga lulusan perguruan tinggi akan mempunyai karakter percaya diri yang tinggi, memiliki kearifan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural bangsa, kemandirian serta jiwa kepemimpinan yang kuat.

Perguruan tinggi harus mampu mengembangkan kurikulum yang holistik, sehingga proses pendidikan tinggi tidak hanya menekankan pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual

(SQ) secara harmonis. Kurikulum holistik yang dimaksud harus

dirancang dengan pendekatan yang kontekstual sehingga mampu memunculkan niche tanpa mengurangi sasaran keilmuaan atau keterampilan pokok pada bidang keilmuan masing-masing (Hamalik Oemar, 2007).

* 1. **Konsep Kerjasama Pendidikan Tinggi**

Mengingat adanya disparitas kualitas calon mahasiswa, ketidakberimbang-an akses terhadap sumber-sumber informasi dan teknologi, serta tidak meratanya akses kerjasama pada perguruan tinggi unggulan, maka diseminasi kemampuan suatu perguruan tinggi kepada perguruan tinggi lain harus diupayakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kerjasama pendidikan, pembentukan jejaring keilmuan (*networking)* atau penyelenggaraan distance learning yang berkualitas dan terencana. Menurut kamus *Webster’s Now World Dictionary* (1962), pendidikan adalah proses pengembangan dan latihan yang mengambil aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill),* dan kepribadian (*character).[[23]](#footnote-23)*

Terutama dilakukan dalam suatu bentuk formula kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan dan transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah pendidikan yang bersifat opsional yang dilanjutkan setelah sekolah menengah pertama, pendidikan tinggi juga lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang ilmu dan dibagi menjadi dua rumpun yaitu ilmu sosial dan ilmu sains.[[24]](#footnote-24) Pendidikan tinggi juga menjadi lembaga *think thank* bagi beberapa negara sebagai lembaga penganalisa kebijakan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk perguruan tinggi yaitu, akademi, politik, universitas, sekolah tinggi, dan institus dan berbagai gelar mulai dari diploma, ahli madya, magister, dan doktor. Terdapat juga gelar keprofesian seperti gelar profesi akuntan (AK).

Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu negeri dan swasta. Universitas atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia berjumlah 300 dengan naungan kemenristel sedangkan swasta 4,500 perguruan tinggo dan khusus bago swasta terdapat badan regulator suatu level dibawah kemenristek.

Ted Panitz dalam Trianto (2007) menyebutkan bahwa pembelajaran kolaboratif suatu filsafat personal, bukan sekedar teknik pembelajaran di kelas. Kolaborasi fillsafat interaksi dan gaya hidup menjadikan kerjasama sebagai suatu struktur interaksi yang dirancang sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pada segala situasi dan ketika sejumlah orang berada dalam suatu kelompok, kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan

Setiap anggota kelompok. Pembagian kewenangan dan penerimaan tanggung jawab di antara para anggota kelompok untuk melaksanakan tindakan kelompok terdapat di dalam kolaborasi. Konsensus yang terbina melalui kerjasama di antara anggota kelompok sebagai lawan dari kompetisi yang mengutamakan keunggulan individu merupakan pokok pikiran yang mendasari pembelajaran kolaboratif. Para praktisi pembelajaran kolaboratif memanfaatkan filsafat ini di: kelas, dalam rapat-rapat komite, dalam berbagai komunitas, dalam keluarga dan secara luas sebagai cara hidup dengan dan dalam berhubungan dengan sesama.

Pola kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia industri telah dirumuskan oleh Depdikbud dengan istilah model pendidikan sistem ganda. Namun implementasinya tidak semudah seperti konsepnya, oleh karenanya model yang lain dengan model pembelajaran kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri pasangannya. Sehingga model pembelajaran kolaborasi ini merupakan implementasi kongkrit dari pelaksanaan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia industry.[[25]](#footnote-25)

Menurut Ahmad Sonhadji (2005) menyatakan bahwa diantara

sistem manajemen pemagangan atau praktik kerja industri yaitu *school model, cooperative education, dual system model,* dan market model yang paling efektif saat ini adalah *mixing model* *(cooperative–dual).*

Pada lembaga pendidikan tinggi selain kegiatan belajar memang dilakukan di lingkungan sekolah juga dilakukan di lingkungan industri, sebagai tempat yang sama-sama digunakan untuk keperluan belajar. Karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Namun keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membentuk kompetensi maha-siswa/peserta diklat (Moedjianto, 1997), mengemukakan beberapa komponen-komponen penting dalam kerjasama, antara lain:

1. Kelembagaan

Dilihat dari segi kelembangaan pembelajaran kolaborasi ini terdiri dari (dua) sub sistem yaitu sub sistem pembelajaran di industri dan sub sistem pembelajaran dikampus.

2. Kurikulum

Kurikulum di lembaga pendidikan tinggi dirancang secara komprehensif yang meliputi semua kegiatan pembelajaran. Sedangkan kurikulum yang ada di industri hanya berupa tuntutan praktik (*training guideslines),* yang jauh lebih sederhana dan lebih praktis dari pada kurikulum lembaga pendidikan.

3. Materi pembelajaran

Materi lembaga pendidikan lebih ditekankan pada pembelajaran teori-teori tinggi, sedangkan materi di industri lebih ditekankan pada praktik kerja tetapi berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di lembaga pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu menggunakan dunia kerja sebagai pijakan dalam perencanaan kurikulum, sehingga pembelajaran di lembaga pendidikan terintegrasi dengan pembelajaran praktik yang dilakukan di industri.

4. Strategi mengajar

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan lebih sistematis karena pelajaran telah disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah teori pembelajaran. Sedangkan pembelajaran di industri lebih menerapkan pada proses pembelajaran keterampilan kerja tertentu (Wena, 1993).

5. Pengajar

Di lembaga pendidikan dosen/dosenlah yang bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan di industri pembelajaran praktik sepenuhnya menjadi tanggung jawab instruktur. Sebagai tenaga pengajar praktik instruktur seyogyanya memahami dan mampu mempraktikkan metodemetode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran praktik di industri.

Dengan demikian pembelajaran praktik kerja di industri betul-betul dapat meningkatkan kualitas kemampuan kompetensi mahasiswa/peserta diklat.

6. Tempat Kerja

Belajar di lembaga pendidikan sebagaian besar dilakukan

di ruang kelas, sedangkan belajar di industri hampir seluruhnya dilakukan di laboratorium. Adanya perbedaan tempat belajar ini tentu pula akan mempengaruhi situasi pembelajaran. Oleh karena itu ketarkaitan yang selaras dan serasi antara kedua tempat belajar seyogyanya diciptakan. Dengan demikian proses pembelajaran pada kedua tempat tesebut dapat dilakukan secara optimal.

1. **Hipotesis Penelitian**

Atas dasar kerangka teori dan asumsi diatas, maka penulis menarik hipotesis, sebagai berikut: **“Dengan bentuk kegiatan seperti, pertukaran pelajar, beasiswa, *research,* dan bantuan pembangunan infrastruktur yang terjalin atas kerjasama Indonesia-Jepang dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi teknik di Indonesia”**

1. **Operasionalisasi Variebel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas: Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang | 1. Indikator: 2. Aktivitas kerjasama Internasional Indonesia. 3. Kegiatan kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang. | Penjelasan mengenai pentingnya beraktivitas kerjasama luar negeri. Melalui website: [*http://ditpolkom.bappenas.go.id*](http://ditpolkom.bappenas.go.id) *-*  Banyaknya data yang diperoleh mengnai sejarah kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang melalui website: https://www.academia.edu/Hubungan-Bilateral-Indonesia   1. Analisis dari aktivitas kerjasama Indonesia-Jepang melalui website: https://www.id.emb\_japan.go.jp/birel\_id |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Terikat:  Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang dibidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. | 1. Terjalinnya aktivitas kerjasama Indonesia-Jepang di bidang pendidikan tinggi teknik. 2. Kegiatan kerjasama Indonesia – Jepang mengenai kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi teknik di Indonesia. | 1. Penjelasan mengenai kegiatan dan data jumlah siswa yang melakukan studi di Jepang/terlibat aktivitas kerjasama pendidikan Indonesia-Jepang. Melalui website: <http://polmed.ac.id>Analisis mengenai dengan terjalinnya kerjasama pendidikan tingkat perguruan tinggi Indonesia-Jepang dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi teknik di Indonesia, salah satunya melalui website: <http://polmed.ac.id> 2. Data sebagai analisis kerjasama Indonesia-Jepang di bidang pendidikan dan bentuk kerjasama ditingkat perguruan tinggi teknik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi teknik Indonesia. 3. Banyak kegiatan antar institusi yang diselenggarakan antar kedua Negara, salah satunya kegiatan *joint working group* sebagai strategi untuk membuat universitas terlibat menjadi kampus terbaik dunia. Melalui: http://www.kemenristekdikti.com |

1. **Skema dan Alur Penelitian**

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Bilateral

Indonesia

Jepang

Kerjasama Pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia

1. Nuthalia Rahmah, “Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang Dalam Perjanjian Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Di Bidang Pertanian”, Skripsi program sarjana Ilmu Hubungan Internasional, diterbitkan oleh program sarjana Universitas Hassanudin, tahun 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Fauziah, “Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Jepang Dalam Bidang Ekspor Non Migas Indonesia ke Jepang Pada Komoditas Pertanian (2011-2015)”, Skripsi program sarjana Ilmu Hubungan Internasional, diterbitkan oleh program sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dikutip melalui: https://www.academia.edu/Atmawinata dkk, 2008: 28/hubungan\_Indonesia\_dan Jepang

   Diakses pada: 22 November 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ade Pebrina, “Peran ASEAN China Center dalam Hubungan Indonesia Tiongkok di Bidang Pendidikan pada tahun 2012 hingga 2016”. Skripsi program sarjana Ilmu Hubungan Internasional, diterbitkan oleh program sarjana Universitas Brawijaya, tahun 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Holsti, K.J. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis., (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodelogi (Edisi Revisi). Jakarta : LP3S, 1987 ), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-11)
12. Goodin, Robert E. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2010 ), hlm. 132. [↑](#footnote-ref-12)
13. Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988),hlm 89 [↑](#footnote-ref-13)
14. http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=27443

    Diakses pada tanggal 10 November 2017, pukul: 20:17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sukawarsini Djelatik, 2008, Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu: Yogyakarta, hal. 85. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adriana Reski Anwar.Op.Cit Hal:30 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kusumohadijojo,1993, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,Gramedia: Jakarta, hlm 30 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kusumohadijojo,1993, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,Gramedia: Jakarta, hlm 45 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ariella Alberthina Yoteni, “Dampak Hubungan Kerjasama Pt Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika”, SKRIPSI HI Universitas Cendrawasih diterbitkan, 2012, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-19)
20. <http://lompoulu.blogspot.com/2013/06/pengertian-kerjasama.html>

    Diakses pada tanggal 10 November 2017, pukul: 20:22 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Meriam, Meriam Webster world dictionary, (Massachusets, Meriam Webster Press,hal 60. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia, (Indonesia Mei 2014). Hal 10. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)